

# Penolakan Tiongkok Dalam Memenuhi Kebutuhan Suku Cadang Pesawat Rusia: Perspektif *Chinese School*

Fetra Ardianto<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Hubungan Internasional, Fakultas Falsafah dan Peradaban, Paramadina Graduate School of Diplomacy. Jl. Gatot Subroto No.Kav. 97, Kota Jakarta Selatan, 12790

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: [fetra.ardianto@students.paramadina.ac.id](mailto:fetra.ardianto@students.paramadina.ac.id)

## Abstract

*This research focuses on understanding China's refusal to meet Russia's demand for aircraft spare parts based on the perspective of the Chinese School, especially the theory of moral realism introduced by Yan Xuetong. The act of refusal by China is an anomaly, considering that China and Russia are two countries that have relations as partners in various international organizations and forums and are two countries that are very active in opposing the hegemony of the Western world in the international sphere. By using one of the concepts offered by the theory of moral realism, namely the concept of a superpower, it can be understood that China regards itself as a Wang country or wangquan (王权). Based on this concept, China in this case seeks to ensure its leadership through morality, so that it can establish stability in the international order. It is China's identity as a Wang country that then makes China choose to refuse to help Russia as a form of preservation of the norm of non-intervention in the international sphere.*

**Keyword:** China, Russia, Chinese School, Moral Realism

## Abstrak

*Penelitian ini berfokus untuk memahami penolakan Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan pasokan suku cadang pesawat Rusia dengan berdasarkan kepada perspektif Chinese School, khususnya teori realisme moral yang diperkenalkan oleh Yan Xuetong. Tindakan penolakan yang dilakukan Tiongkok menjadi sebuah anomali, mengingat Tiongkok dan Rusia merupakan dua negara yang memiliki hubungan sebagai mitra dalam berbagai organisasi dan forum Internasional serta merupakan dua negara yang sangat aktif menentang hegemoni dunia Barat pada ranah internasional. Dengan menggunakan salah satu konsep yang ditawarkan oleh teori realisme moral yaitu jenis kepemimpinan internasional, dapat dipahami bahwa Tiongkok menganggap dirinya sebagai negara wang atau wangquan (王权). Berdasarkan konsep tersebut, Tiongkok dalam hal ini berupaya memastikan pemimpin melalui moralitas, sehingga dapat membentuk stabilitas pada tatanan internasional. Identitas Tiongkok sebagai negara wang tersebutlah yang kemudian membuat Tiongkok memilih untuk menolak membantu Rusia sebagai bentuk dari pelestarian terhadap norma non-intervensi pada ranah internasional.*

**Kata kunci:** Tiongkok, Rusia, Chinese School, Realisme Moral

## PENDAHULUAN

Serangan yang dilakukan oleh militer Rusia ke beberapa kota penting di wilayah timur Ukraina

pada 24 Februari 2022 telah menyebabkan kekhawatiran serta kepanikan besar bagi masyarakat Ukraina. Pada hari pertama penyerangan yang dilakukan oleh militer Rusia

tersebut, tercatat 137 orang tewas dan 320 orang mengalami luka-luka akibat ledakan yang berasal dari mesin senjata yang diluncurkan militer Rusia di wilayah Ukraina. (Nasution dan Raudi, 2022).

Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam hal ini kemudian mengkonfirmasi pembenaran terkait dengan langkah yang diambil mengenai serangan yang dilakukan oleh Rusia dengan menyebutkan bahwa kehadiran militer Rusia di wilayah Ukraina merupakan tindakan yang berkaitan dengan upaya demiliterisasi serta denazifikasi terhadap Ukraina (Ugoala, 2022). Selain itu Putin juga menegaskan bahwa Rusia tidak memiliki keinginan untuk mengambil posisi yang berkaitan dengan upaya menduduki wilayah Ukraina, melainkan dalam hal ini Rusia berupaya mendorong serta mendukung secara penuh hak rakyat Ukraina untuk bebas dari pemerintahan Ukraina saat ini yang dipimpin oleh Volodymyr Zelenskyy selaku Presiden Ukraina, sehingga nantinya rakyat Ukraina dapat bebas dalam menentukan nasibnya sendiri (Syahbuddin dan Haryati, 2022). Lebih lanjut, untuk memberikan penekanan terkait dengan kebenaran terhadap tindakan yang telah diambil oleh Rusia, Pemerintah Rusia dalam hal ini kemudian melabeli tindakan tersebut sebagai bagian dari kegiatan militer yang dikenal dengan sebutan “operasi militer khusus” (Shetsova, 2022).

Langkah agresif yang diambil oleh Rusia terhadap Ukraina selanjutnya mendapat perhatian serta beragam respon dari dunia internasional. Tidak sedikit negara di dunia yang dalam hal ini kemudian menanggapi keputusan yang dipilih oleh pemerintah Rusia dengan mengemukakan langkah maupun tindakan yang telah dipilih oleh Rusia terhadap Ukraina, kecaman yang muncul khususnya banyak berasal dari negara-negara Barat (Amerika Serikat serta Uni Eropa) (Hutabarat, 2022). Sebagai bentuk kecaman terhadap pemerintah Rusia serta bentuk dukungan terhadap pemerintah Ukraina, mayoritas negara Barat kemudian mengambil langkah keras dengan menjatuhkan berbagai sanksi ekonomi kepada Rusia (Pamungkas, dkk, 2022). Salah satu sanksi ekonomi yang kemudian diberikan oleh Barat kepada Rusia adalah dengan melakukan pembatasan serta larangan ekspor berbagai produk suku cadang pesawat ke Rusia. Sanksi yang diberikan tersebut dalam hal ini

ditakutkan akan berpengaruh kepada tingkat keselamatan dan keamanan sektor aviasi yang dimiliki Rusia. Lebih lanjut, apabila tidak ditangani dengan baik, ditakutkan sanksi yang diberikan tersebut dapat mengancam serta membahayakan keselamatan para penumpang maskapai penerbangan yang menggunakan pesawat milik Rusia. Dengan adanya sanksi dari negara-negara Barat yang menghantam Rusia, Barat dalam hal ini meyakini bahwa langkah yang telah diambilnya sebagai bentuk dukungan terhadap Ukraina, nantinya akan mendorong Rusia untuk memikirkan kembali tindakan yang telah dipilihnya terhadap Ukraina. Selain itu dengan adanya pemberian sanksi oleh Barat kepada Rusia juga diharapkan dapat mengantarkan Rusia kepada pilihan untuk mengakui kesalahannya dalam menyerang Ukraina serta mendorong Rusia untuk mau berdiskusi dengan Ukraina di meja perdamaian (Pandey dan Kumar, 2022).

Menanggapi sanksi yang telah diberikan oleh Barat kepada Rusia, terkait dengan keputusan yang telah diambil Rusia terhadap Ukraina, dalam hal ini pemerintah Rusia berupaya menyelesaikan permasalahan pasokan suku cadang pesawat dengan mencoba meminta bantuan kepada negara-negara lain. Salah satu negara yang kemudian menjadi tujuan Rusia dalam meminta bantuan terkait dengan upaya pemenuhan pasokan suku cadang pesawat tersebut adalah Tiongkok. Namun keinginan Rusia untuk memperoleh bantuan terkait dengan pemenuhan pasokan suku cadang pesawat tersebut dalam hal ini mendapat penolakan oleh pemerintah Tiongkok, dimana Tiongkok dengan tegas tidak ingin memberikan bantuan kepada Rusia dalam memenuhi kebutuhan pasokan suku cadang pesawat (Reuters, 2022).

Penolakan yang dilakukan Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan akan suku cadang pesawat bagi Rusia tersebut kemudian menjadi sebuah anomali, mengingat Rusia dan Tiongkok dikenal sebagai sekutu dari dunia non-Barat yang sangat berupaya menentang hegemoni dari dunia Barat di ranah internasional. Selain Tiongkok dan Rusia juga dikenal sebagai mitra strategis yang terlibat aktif pada berbagai organisasi maupun forum internasional seperti BRICS dan SCO. Berdasarkan hubungan serta identitas yang telah dibangun oleh kedua negara tersebut,

seharusnya Rusia dapat dengan mudah memperoleh bantuan pasokan suku cadang pesawat dari Tiongkok, namun dalam hal ini Tiongkok mengambil keputusan yang bertentangan dengan hubungan dan identitas yang telah dibangunnya dengan Rusia yaitu dengan menolak permintaan Rusia untuk memenuhi pasokan suku cadang pesawat.

Berdasarkan peristiwa penolakan yang dilakukan oleh Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan suku cadang pesawat ke Rusia, dalam hal kemudian ini mengantarkan peneliti pada sebuah pertanyaan yang selanjutnya dituangkan ke dalam rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: Mengapa Tiongkok lebih memilih menolak membantu Rusia dalam memenuhi kebutuhan pasokan suku cadang pesawat bagi negara tersebut, dimana padahal kedua negara dikenal sebagai mitra strategis dalam berbagai organisasi maupun forum internasional?. Merujuk kepada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami (*to understand*) tindakan atau perilaku yang dibangun oleh Tiongkok dalam menolak membantu memenuhi pasokan suku cadang pesawat ke Rusia. Secara khusus penelitian ini akan berupaya memahami peristiwa terkait dengan menggunakan perspektif atau pemikiran Hubungan Internasional (HI) dari dunia non-Barat. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan lensa HI yang berasal dari para sarjana HI Tiongkok, yang kemudian berbagai pemikiran dari para sarjana tersebut tertuang ke dalam aliran pemikiran yang dikenal dengan sebutan *Chinese School*. Secara mendalam penelitian ini akan berupaya menganalisis peristiwa penolakan yang dilakukan oleh Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan suku cadang pesawat ke Rusia dengan menggunakan salah satu teori dari aliran pemikiran *Chinese School* yang dipopulerkan oleh Yan Xuetong, yaitu teori 'realisme-moral' (Acharya, 2019). Dengan menggunakan kacamata yang berasal dari perspektif Tiongkok, diharapkan nantinya dapat memberikan pemahaman yang bersifat komprehensif terkait dengan peristiwa yang terjadi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk dalam kategori penelitian interpretif.

Menurut Umar S Bakry (2016) penelitian interpretif merupakan sebuah jenis penelitian yang kemudian bertujuan untuk memahami (*to understand*) suatu fenomena atau peristiwa hubungan internasional. Untuk memahami sebuah fenomena maupun peristiwa, penelitian interpretif akan berupaya menganalisis suatu realitas sosial serta bagaimana hal tersebut dapat terkonstruksi (Izzalqurny dan Nabila, 2021) Dalam hal ini, penelitian interpretif merupakan tipe penelitian yang memandang realitas sosial atau konstruksi sosial ke dalam sifat-sifat holistik, kompleks, dinamis, tidak saling terpisah, serta mengandung berbagai makna subjektif (Rahardjo, 2018). Pada penelitian ini, tipe penelitian interpretif digunakan untuk memahami perilaku dari Tiongkok yang dimana menolak memberikan bantuan pasokan suku cadang pesawat kepada Rusia.

Selain tipe penelitian, subjek penelitian serta objek penelitian menjadi bagian penting lainnya yang terdapat dalam sebuah metode penelitian. Sugiyono (2015) dalam hal ini menyebutkan bahwa subjek penelitian merupakan sebuah atribut, benda, hal, serta individu maupun kelompok yang dimana setiap data penelitian melekat dan terdapat di dalamnya. Sedangkan lebih lanjut, Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai objek penelitian adalah suatu aktivitas tertentu yang dipilih atau ditetapkan untuk kemudian dipelajari dan nantinya ditarik sebuah kesimpulan.

Dalam penelitian ini, subjek penelitian mengarah kepada setiap pernyataan-pernyataan resmi serta dokumen-dokumen resmi yang bersumber dari pemerintah Tiongkok khususnya yang berasal dari pejabat-pejabat yang berasal dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Sedangkan objek penelitian di dalam penelitian ini merujuk kepada tindakan penolakan Tiongkok dalam memenuhi pasokan suku cadang pesawat untuk Rusia.

Metode pengumpulan data dalam hal ini menjadi bagian lainnya dalam sebuah metode penelitian. Hasanah (2017) menerangkan bahwa metode pengumpulan data merupakan suatu teknik, kaidah, maupun cara yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai data penting yang nantinya akan dibutuhkan di dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini,

terdapat dua metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode pengumpulan data berbasis dokumen (*document-based research*) dan metode pengumpulan data berbasis internet (*internet-based research*). Dalam hal ini Metode pengumpulan data berbasis dokumen merupakan upaya pengumpulan sumber data melalui berbagai penelusuran dokumen, jurnal, buku, karya ilmiah, berita dan lain sebagainya (Bowen, 2009). Berbeda dengan metode pengumpulan data berbasis dokumen, dalam hal ini metode pengumpulan data berbasis internet merupakan metode yang digunakan pada sebuah penelitian untuk memperoleh sumber-sumber penelitian yang bersifat valid melalui aktivitas penelusuran di internet atau dunia maya (Benfield dan Szlemko, 2006).

Metode Analisis data dalam hal ini menjadi bagian terakhir dalam sebuah metode penelitian yang dimana juga bersifat krusial. Metode analisis data yang kemudian dipilih untuk digunakan pada penelitian ini adalah berupa metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2015) metode penelitian kualitatif merujuk kepada metode penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, serta menerangkan sebuah keistimewaan yang terdapat pada suatu fenomena atau peristiwa yang sedang diteliti, yang dimana tidak mampu dijelaskan, diukur maupun digambarkan melalui metode yang bersifat kuantitatif.

Secara khusus metode analisis data kualitatif yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode analisis data sekunder (*secondary analysis*). Bakry (2016) dalam hal ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan metode analisis data sekunder merupakan sebuah metode yang berguna untuk menggambarkan suatu praktis analisis dengan menggunakan berbagai data yang sudah tersedia, baik data yang telah dikumpulkan oleh peneliti lain maupun yang berasal dari sebuah instansi pemerintah. Metode analisis data sekunder dalam hal ini kemudian dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena dapat memberi kesempatan bagi peneliti untuk kemudian menganalisis berbagai data yang masuk yang bersifat longitudinal sehingga memungkinkan peneliti untuk dapat mengikuti perkembangan dari sebuah peristiwa atau fenomena dari waktu ke waktu (Bakry, 2016).

## TEORI DAN KONSEP

Sebagai sebuah kontribusi dalam studi Hubungan Internasional (HI), *Chinese School* memang belum semapan aliran pemikiran lainnya (*English School*, *Frankfurt School*, dan *Copenhagen School*). Namun seiring hadirnya Tiongkok dengan kekuatannya sebagai “lawan yang seimbang” bagi Dunia Barat (Amerika Serikat dan Uni Eropa) di abad ke-21 ini, pembahasan mengenai *Chinese School* mulai memperoleh perhatian oleh para sarjana HI, dimana hal tersebut dapat dilihat dari terbitnya sejumlah literatur studi HI yang mulai membahas perkembangan pemikiran HI ala Tiongkok tersebut (Bakry, 2017). Secara umum, berbagai teori yang terdapat di dalam aliran pemikiran *Chinese School* berakar dari budaya, filsafat, serta sejarah panjang yang telah dilalui oleh bangsa Tiongkok sejak ribuan tahun lalu. Pemikiran filsafat, budaya, serta pengalaman sejarah tersebut kemudian dijadikan pondasi oleh para akademisi HI di Tiongkok untuk membangun perspektif HI yang khas ala Tiongkok (Rosyidin, 2020). Dalam upaya pembangunan perspektif HI Tiongkok, terdapat banyak sarjana HI Tiongkok yang berupaya menyumbangkan berbagai pemikirannya demi tercapainya kemapanan dari aliran pemikiran HI tersebut, seperti Zhao Tingyang yang menawarkan konsep “*Tianxia*” atau “*all under heaven*”, Qin Yaqing dengan pandangan relasi harmonis ala Taoisme yang dikenal sebagai teori relasional, serta Yan Xuetong dengan pemikirannya yang mencoba mengelaborasi ajaran konfusianisme dengan perspektif realisme, dimana kemudian dikenal dengan realisme-konfusianisme atau teori realisme-moral. Namun, untuk penelitian ini akan difokuskan kepada salah satu teori yang terdapat di dalam *Chinese School* yaitu teori realisme-moral yang diperkenalkan oleh Yan Xuetong.

Yan Xuetong (2019) menyebutkan bahwa teori realisme-moral merupakan suatu teori yang berupaya memahami perilaku negara ketika moralitas menjadi faktor yang berkontribusi terhadap preferensi strategis kepemimpinan negara tersebut. Dalam hal ini konsep dari moralitas tidak hanya ditetapkan menjadi sebuah slogan kosong, melainkan menentukan jenis kebijakan dan perilaku tertentu untuk mencapai pemaksimalisasian kepentingan dari suatu aktor (Acharya, 2019). Teori realisme-

moral sendiri membagi moralitas menjadi tiga kategori yaitu moralitas pribadi, moralitas negara, dan moralitas dunia. Moralitas pribadi merujuk kepada sifat tidak dapat disuap, kesetiaan, serta kejujuran, sedangkan moralitas dunia lebih mengarah kepada sifat-sifat, seperti pasifisme, karitas, dan konservasionisme. Namun dalam hal ini moralitas dunia bukanlah acuan yang digunakan oleh kaum realisme-moral untuk menilai sebuah moralitas kepemimpinan politik. Melainkan kaum realisme-moral lebih merujuk kepada moralitas negara dalam upaya memahami moralitas kepemimpinan politik, seperti kewajiban untuk mengimplementasikan norma internasional, kredibilitas strategis kepada sekutu, serta tanggung jawab untuk melindungi kepentingan dari rakyat (Krivokhizh dan Soboleva, 2017). Teori realisme-moral dalam hal ini menawarkan integrasi dari dua tradisi yang berbeda yaitu realisme dan konfusianisme dengan tujuan untuk menutupi kekurangan masing-masing, dimana pemikiran realisme kerap kali abai akan pentingnya nilai-nilai etis, sedangkan konfusianisme luput akan pemikiran mengenai politik kekuasaan (Zhang, 2012).

Untuk memahami studi HI dewasa ini, teori realisme-moral menawarkan perspektif yang berbeda dengan pandangan HI Barat khususnya dalam melihat konsep-konsep yang terdapat dalam studi HI seperti kekuatan politik, kepentingan nasional, strategi kebijakan luar negeri, serta tipe kepemimpinan internasional. Salah satu konsep dari teori realisme-moral yang dalam hal ini kemudian dapat digunakan untuk memahami perilaku Tiongkok dalam menolak membantu Rusia untuk memenuhi pasokan suku cadang pesawat adalah tipe kepemimpinan internasional. Yan xuetong (2011) menyebutkan bahwa tatanan dan stabilitas internasional bergantung kepada bentuk kepemimpinan internasional yang dimiliki oleh suatu negara adikuasa. Lebih lanjut Xuetong (2019) menerangkan bahwa dalam teori realisme-moral terdapat empat jenis bentuk kepemimpinan internasional, yaitu tirani, anemokrasi, hegemoni, dan *wang* atau otoritas manusiawi. Tirani merujuk kepada tatanan dunia di mana negara adidaya cenderung berusaha mencapai kepemimpinan dengan kekuatan militer saja, tatanan dunia seperti itu dicirikan oleh perang, penaklukan, serta ketidakstabilan sistem internasional. Selain tirani, jenis kepemimpinan internasional

lainnya adalah anemokrasi, negara adidaya yang dikategorikan sebagai anemokrasi dalam hal ini cenderung akan bertindak dengan menggunakan kebijakan standar ganda, dimana kemudian menyebabkan kepemimpinan di bawah negara anemokrasi sulit untuk dapat dipercaya oleh negara-negara lain. Sedangkan kepemimpinan internasional dalam bentuk hegemoni dalam hal ini cenderung akan bergantung kepada kekuatan militer dan ekonomi, namun tidak mengecualikan kekuatan politik dengan mengadakan aliansi. Berbeda dari ketiga jenis kepemimpinan internasional sebelumnya, negara *wang* dalam hal ini lebih cenderung memprioritaskan pengembangan kekuatan politik dan bukan militer maupun ekonomi, dimana negara *wang* membangun tatanan dan stabilitas internasional melalui prinsip-prinsip moralitas (Xuetong, 2011).

Jenis kepemimpinan internasional juga berbeda satu sama lain dalam sikapnya terhadap norma internasional yang berperan penting pada sistem internasional. Dalam pelaksanaan suatu norma internasional, negara yang dikategorikan sebagai tirani tidak memiliki nilai strategis sehubungan dengan kepatuhan terhadap norma-internasional. Ketika menjadi kekuatan dominan, negara tirani memimpin dengan merusak moral internasional, dimana norma internasional tidak mengalami perluasan dan pengadopsian oleh negara lain. Sedikit berbeda dengan tirani, dalam melaksanakan norma internasional anemokrasi tidak akan mengambil tanggung jawab untuk mempertahankan nilai-nilai pada sebuah norma internasional, serta tindakannya seringkali bertentangan dan membingungkan. Dibandingkan dengan tirani dan anemokrasi, negara yang dikategorikan sebagai hegemonik cenderung dapat mengikuti norma internasional. Namun negara hegemonik akan mempertahankan solidaritas dan kredibilitas strategisnya hanya di dalam aliansi saja, dimana tindakan tersebut dapat mengganggu stabilitas sistem internasional. Dari ketiga tipe kepemimpinan internasional sebelumnya, negara yang dikategorikan sebagai *wang* merupakan yang paling baik dalam melaksanakan norma internasional, dimana negara *wang* cenderung lebih mengutamakan dan mematuhi norma-norma internasional yang ada dibandingkan dengan negara tirani, anemokrasi, maupun hegemoni (Xuetong, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Antagonisme Tiongkok dan Rusia Tempo Dulu: Perbedaan Karakteristik dan Konflik di Perbatasan**

Konstruksi hubungan yang tercipta antara Tiongkok dan Rusia dalam hal ini telah mengalami perjalanan pembangunan yang panjang, dimana kedua negara telah lama saling terlibat ke dalam berbagai pasang surut hubungan. Sebelum memasuki tahun 1990-an Rusia awalnya merupakan sebuah negara besar yang berdiri dengan ideologi komunisnya, dimana negara tersebut dikenal dengan nama Uni Soviet. Selain Uni Soviet yang hadir sebagai negara besar dengan ideologi komunis, terdapat beberapa negara di dunia yang juga berdiri dengan memilih haluan sebagai negara komunis, salah satu negara komunis besar yang dalam hal ini juga memiliki kedekatan geografis dengan Uni Soviet adalah Tiongkok. Walaupun merupakan dua negara yang memiliki kesamaan identitas sebagai negara komunis serta memiliki wilayah yang saling berdekatan satu sama lain sehingga sangat memungkinkan bagi kedua negara untuk dapat saling terhubung satu sama lain, nyatanya di masa Rusia saat masih dikenal sebagai Uni Soviet, hubungan antara Tiongkok dengan negara tersebut kerap terjebak ke dalam ikatan yang bersifat kurang harmonis (Iliev, et.al., 2015).

Sebagai dua negara yang berdiri dengan haluan ideologi komunisme, nyatanya terdapat perbedaan dalam identitas komunisme yang dimiliki oleh Uni Soviet dan Tiongkok khususnya pada basis karakteristik komunisme yang dimiliki oleh kedua negara. Uni Soviet dalam hal ini memiliki basis karakter komunisme industrial yang condong berfokus kepada peningkatan kesejahteraan para pekerja atau buruh. Berbeda dengan Uni Soviet, basis karakteristik komunis yang dimiliki Tiongkok adalah komunisme agraris yang dimana cenderung mengarah kepada berbagai upaya pembangunan kesejahteraan bagi para petani (Perry, 2019). Menurut Hongyi Harry Lai (2005) karakteristik komunisme yang dimiliki Tiongkok tidak terlalu mengakar kuat sehingga dapat mengadopsi kebijakan eksternal sesuai yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Lebih lanjut Lai (2005) menerangkan bahwa karakteristik komunisme yang dimiliki oleh Uni Soviet dalam hal ini lebih mengakar kuat

dibandingkan dengan Tiongkok, dimana menyebabkan berbagai kebijakan yang telah dibangun oleh Uni Soviet sulit untuk mengalami reformasi. Adanya perbedaan dalam basis karakteristik khususnya pada tingkat pengakaran yang kemudian berpengaruh dalam pengadopsian serta pereformasian suatu kebijakan, dalam hal ini telah menyebabkan munculnya perspektif yang berbeda bagi kedua negara dalam melihat situasi dan kondisi internal maupun eksternal. Hal ini kemudian membentuk kebijakan dan pengambilan keputusan yang berbeda antara Tiongkok dan Uni Soviet dalam berbagai sektor yang kerap kali memunculkan selisih paham bagi kedua negara, permasalahan tersebut juga semakin diperparah dengan adanya perebutan wilayah perbatasan yang kemudian mendorong Uni Soviet dan Tiongkok menciptakan situasi pertempuran di wilayah perbatasan kedua negara (Bin, 2010).

Selama akhir tahun 1960-an hingga 1970-an perselisihan mengenai wilayah perbatasan yang terjadi antara Tiongkok dan Uni Soviet tidak menemukan jalan terang dan terus mengalami penguatan menuju kearah konflik yang lebih besar (Nemeth, 2021). Penguatan potensi konflik antar kedua negara di wilayah perbatasan tersebut dalam hal ini ditunjukkan dengan adanya keseriusan para pemimpin Uni Soviet dalam memikirkan langkah-langkah yang merujuk kepada upaya serangan nuklir yang ditujukan terhadap Tiongkok sebagai tanggapan atas pertempuran kedua negara di wilayah perbatasan (Gerson, 2010). Dalam rangka mengatasi permasalahan yang dapat merugikan eksistensi serta posisi Tiongkok di wilayah perbatasan, pada tahun 1972, Mao Zedong selaku pemimpin Tiongkok, mengambil langkah berani dengan menanggapi tawaran kerjasama yang diberikan oleh Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon, untuk kemudian membawa Tiongkok bersama dengan militer Amerika Serikat melakukan penyeimbangan kekuatan dalam rangka memperkuat posisi untuk melawan Uni Soviet di wilayah perbatasan (Ferdinand, 2011). Selama dekade berikutnya, selalu muncul lebih banyak bahaya bentrokan perbatasan baru di wilayah yang disengketakan oleh kedua negara, dimana kemudian meningkat menjadi konflik yang lebih serius yang mengancam hubungan antara Tiongkok dan Uni Soviet.

### **Hubungan Tiongkok dan Rusia Dewasa Ini: Pembangunan Kemitraan dan Ancaman Bersama**

Hubungan antara Tiongkok dan Uni Soviet mengalami keajaiban perkembangan menuju kearah yang lebih baik khususnya di masa kepemimpinan Mikhail Gorbachev, dimana Gorbachev menjadi pemimpin Uni Soviet pertama yang mengusulkan penarikan pasukan bersama dari wilayah perbatasan yang telah lama disengketakan oleh kedua negara. Tiongkok dalam hal ini kemudian merespon dengan baik usulan dari pemimpin Uni Soviet tersebut, dimana selanjutnya usulan penarikan pasukan bersama tersebut dengan cepat berkembang menjadi rekonsiliasi yang dapat melegakan kedua pihak (Ferdinand, 2011). Berakhirnya rezim komunis Uni Soviet pada 26 Desember 1991, dimana kemudian negara tersebut terlahir kembali sebagai negara yang dikenal dengan nama Rusia, dalam hal ini memperoleh sambutan hangat oleh berbagai negara di dunia termasuk Tiongkok. Tiongkok dalam hal ini sadar akan hubungan kelamnya dengan Rusia di masa lalu (Uni Soviet) dimana banyak memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu agar hubungan Tiongkok dengan Rusia nantinya dapat terjaga pada jalur yang lebih harmonis, Tiongkok dalam hal ini berupaya mengajak Rusia untuk terikat dalam jalinan ikatan persahabatan antar negara. Dimana kemudian pada tahun 1992 Tiongkok dan Rusia sepakat menandatangani perjanjian tentang hubungan persahabatan yang meliputi perjanjian untuk bertukar kantor perwakilan serta memperluas kontak bilateral diantara kedua negara (Bellacquea, 2007).

Selain adanya perjanjian persahabatan yang dalam hal ini telah ditandatangani oleh kedua negara, komitmen antara Tiongkok dan Rusia dalam membangun hubungan yang lebih baik untuk kedepannya juga ditunjukkan dalam keikutsertaan kedua negara pada organisasi keamanan regional yang dikenal sebagai *Shanghai Five*. Pada tahun 1996, Tiongkok dan Rusia serta tiga negara lainnya yang berasal dari kawasan Asia Tengah yaitu Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan menandatangani dokumen kesepakatan kerjasama keamanan regional dalam rangka mengatasi delimitasi dan memupuk kepercayaan bersama, dimana kemudian dokumen tersebut memprakarsai berdirinya organisasi keamanan regional *Shanghai Five*

(Zhuangzi, 2007). Adanya pertimbangan terhadap perkembangan global serta eksistensi dari setiap negara anggota di kancah internasional, dalam hal ini kemudian mendorong kesepakatan bersama para negara anggota untuk mengubah *Shanghai Five* menjadi sebuah organisasi keamanan internasional-regional yang berfokus dalam mengatasi ancaman "*Three Evil Force*" yaitu terorisme, separatisme, dan radikalisme dimana kemudian dikenal sebagai *Shanghai Cooperations Organisation (SCO)* (Laumulin, 2006). Dalam keanggotaan SCO, Tiongkok dan Rusia kerap kali terikat dalam hubungan yang bersifat persahabatan (*kantian*), dimana kedua negara sering kali terlibat bersama dalam melakukan latihan militer serta melaksanakan dialog bersama dalam rangka meningkatkan kekuatan keamanan para negara anggota.

Selain kedua negara telah tergabung di dalam keanggotaan SCO, komitmen akan terciptanya hubungan yang bersifat *kantian* antara Tiongkok dan Rusia dalam hal ini tidak hanya berfokus pada kerjasama di bidang keamanan. Namun, komitmen pembangunan hubungan positif di antara kedua negara dalam hal ini juga tercermin dalam bidang ekonomi dan bisnis. Secara bilateral Rusia merupakan mitra terpenting bagi Tiongkok khususnya dalam memenuhi kebutuhan akan minyak dan gas alam, sedangkan kehadiran Tiongkok juga sama pentingnya bagi perekonomian Rusia, dimana Tiongkok merupakan negara pengekspor terbesar berbagai produk elektronik ke Rusia (Dobrynskaya dan Turkisch, 2010). Pada dimensi multilateral, upaya pembangunan hubungan kerjasama ekonomi dan bisnis oleh kedua negara tercermin dalam sebuah asosiasi ekonomi yang dikenal sebagai BRIC. BRIC sendiri merupakan akronim dari empat negara yang dikategorikan sebagai "*emerging market*" oleh Bank Amerika Serikat, Goldman Sachs, yaitu Brazil, Rusia, India, dan Tiongkok (BRIC). Pada akhir tahun 2001, keempat negara tersebut kemudian bersepakat untuk melakukan kerjasama pembangunan ekonomi dan bisnis dalam bentuk asosiasi ekonomi yang kemudian dikenal sebagai BRIC. BRIC dalam hal ini kemudian mengalami pergantian nama menjadi BRICS, dimana hal tersebut terjadi setelah afrika selatan masuk menjadi anggota tetap dalam asosiasi ekonomi tersebut di tahun 2011 (Priangani, 2015). Pada keanggotaan BRICS, hubungan antara Tiongkok dan Rusia

dalam hal ini berlangsung dengan progresif, dimana melalui asosiasi ekonomi tersebut kedua negara dapat saling bertukar pikiran melalui berbagai diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan berbagai kerjasama ekonomi kedepannya khususnya pada sektor perdagangan, bisnis, dan investasi (Gusarova, 2019). Bergabungnya Tiongkok dan Rusia ke dalam SCO dan BRICS kemudian telah membentuk ikatan kuat bagi hubungan kedua negara yang dikenal sebagai mitra strategis.

Tumbuh serta berkembangnya Tiongkok dan Rusia menjadi dua negara besar dalam hal ini berakar dari visi serupa yang dimiliki oleh kedua negara yang dimana bertujuan untuk membangun tatanan dunia internasional yang lebih baik dan seimbang, seperti Tiongkok dengan konsep jalur sutra barunya (*New Silk Road*) dan Rusia dengan konsep kesatuan ekonomi Eurasia (*Eurasian Economic Union*). Lahirnya visi global yang dimiliki oleh kedua negara Non-Barat tersebut dalam hal ini dianggap oleh Dunia Barat sebagai ancaman yang dapat mengganggu eksistensi serta hegemoni Barat yang telah kukuh di ranah internasional (Kaczmarek, 2017). Upaya mempertahankan hegemoni yang dimiliki oleh Barat dalam hal ini kerap kali ditunjukkan oleh Barat dengan melakukan perluasan hegemoni serta intervensi ke sejumlah wilayah yang berkaitan dengan Tiongkok maupun Rusia. Tindakan Campur tangan Barat dalam upaya membendung pergerakan kekuatan Tiongkok dalam hal ini dapat dilihat dari kasus Laut Tiongkok Selatan, dimana Barat mengklaim memiliki kepentingan dalam menjamin kebebasan navigasi di wilayah tersebut (Pamungkas, 2013). Selain Tiongkok, Barat dalam hal ini kerap kali tampak terlihat berupaya memantik amarah dari Rusia. Hal tersebut disebabkan karena adanya upaya perluasan keanggotaan NATO yang dilakukan oleh Barat terhadap negara-negara eks Uni Soviet seperti Ukraina dan Georgia dalam rangka memperluas dan memperkuat posisi dari hegemoni Barat. Tindakan Barat tersebut kemudian dipersepsikan oleh Rusia sebagai ancaman potensial yang dapat mengganggu kedaulatan teritorial dari Rusia (Tsygankov, 2013). Adanya intervensi dan tekanan dari Dunia Barat kepada Tiongkok dan Rusia dalam hal ini kemudian membentuk persepsi kedua negara dalam melihat Barat sebagai ancaman

yang dapat mengganggu eksistensi dari negara-negara Non-Barat pada ranah internasional. Hadirnya kesamaan persepsi ancaman yang dihadapi oleh Tiongkok dan Rusia serta adanya kemitraan yang dibangun oleh kedua negara di sektor keamanan dan ekonomi, dalam hal ini telah mengkonstruksi hubungan persahabatan yang jauh lebih kuat antara Tiongkok dan Rusia.

### **Memahami Penolakan Tiongkok Dalam Memenuhi Kebutuhan Pasokan Suku Cadang Pesawat Rusia**

Sebagai imbas dari serangan yang telah dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina, banyak dari negara Barat dalam hal ini kemudian menjatuhkan berbagai sanksi ekonomi kepada Rusia atas tindakan agresifnya terhadap Ukraina. Salah satu sanksi yang diberikan oleh Barat adalah dalam bentuk pembatasan serta larangan ekspor berbagai produk suku cadang pesawat (Pamungkas, dkk, 2022). Pemerintah Rusia dalam hal ini menyadari bahwa hadirnya sanksi ekonomi dari Barat tersebut dapat mengancam secara penuh keamanan Rusia khususnya pada sektor aviasi yang Rusia miliki. Oleh karena itu, pemerintah Rusia dalam hal ini mencoba untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan meminta bantuan pemenuhan pasokan suku cadang pesawat dari berbagai negara yang telah menjalin hubungan dengan Rusia sebagai mitra strategis. Salah satu negara mitra strategis yang kemudian menjadi tujuan dari Rusia dalam meminta bantuan untuk mengatasi sanksi ekonomi yang diberikan oleh negara-negara Barat adalah Tiongkok.

Dewasa ini kejayaan ekonomi yang dimiliki Tiongkok telah membawa negara tersebut menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia yang diperhitungkan di kancah global. Adanya kebangkitan Tiongkok dalam percaturan internasional dipandang sebagai fenomena berakhirnya dominasi Dunia Barat serta lahirnya Tiongkok sebagai “*new global power*” dari kawasan Asia (Ansori, 2018). Menurut Qin Yaqing (2010) sebagai negara yang diperhitungkan untuk menjadi negara adikuasa baru, Tiongkok memiliki cara yang berbeda dari Barat dalam membangun tatanan internasional. Barat dalam hal ini cenderung melihat dunia dalam kerangka pemikiran Hegel, dimana tesis dan antitesis berdiri berlawanan satu sama lain dalam sebuah



struktur, seperti budak dan pemilik budak. Berdasarkan hubungan esensial antara tesis dan antitesis, Barat percaya bahwa setiap entitas yang bernaung pada kutub yang berbeda di dalam hubungan internasional akan selalu terjebak pada situasi kontradiktif, konfliktual, dan konfrontatif sehingga menyebabkan terbentuknya tatanan internasional yang bersifat saling mencurigai bagi para aktor. Berbeda dengan Barat, Tiongkok tidak melihat adanya kontradiksi antara tesis dan antitesis. Menurut pandangan Tiongkok, tesis dan antitesis dalam hal ini saling bergandengan dan melengkapi satu sama lain yang kemudian membentuk suatu ko-tesis. Berdasarkan pemikiran tersebut Tiongkok melihat tatanan global benar terdiri dari berbagai aktor yang berbeda baik secara kepentingan maupun perannya di dunia internasional. Namun perbedaan tersebut tidak mengarah kepada kecenderungan untuk berkonflik, melainkan merupakan upaya sadar untuk dapat saling melengkapi satu sama lain, dimana hal tersebut akan mengantarkan kepada hubungan yang bersifat harmoni bagi setiap aktor, sehingga nantinya berdampak kepada struktur yang lebih stabil (Yaqing, 2010).

Upaya Tiongkok untuk membangun tatanan global yang nantinya dapat lebih bersifat stabil dalam hal ini tercerminkan dari gaya kepemimpinan internasional yang dipilih oleh Tiongkok. Menurut Yan Xuetong (2019) sebagai negara yang diperhitungkan menjadi “*new global power*”, Tiongkok tidak berupaya mengikuti gaya kepemimpinan internasional ala Dunia Barat seperti tirani, anemokrasi, maupun hegemoni. Melainkan Tiongkok lebih ingin memposisikan kepemimpinannya dengan menerapkan gaya kepemimpinan internasional ala Tiongkok yang dikenal sebagai *wang* atau otoritas manusiawi. Dalam membangun sebuah tatanan dan stabilitas internasional, negara *wang* akan lebih mengutamakan nilai-nilai moralitas serta mengimplementasikan norma internasional secara baik dalam menunjukan kepemimpinan (Xuetong, 2011). Dengan memposisikan diri sebagai negara *wang*, Tiongkok dalam hal ini berupaya membangun tindakannya agar sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan norma-norma internasional yang berlaku, dimana Tiongkok berupaya mempertahankan kredibilitas strategis yang tinggi dalam membentuk tatanan internasional melalui tiga cara, yaitu: (1) menjadikan dirinya

sebagai contoh yang baik bagi negara lain melalui tindakan yang sesuai dengan norma-norma internasional; (2) mempromosikan norma-norma internasional melalui pemberian penghargaan kepada negara-negara yang mematuhi norma-norma internasional; dan (3) memberikan hukuman kepada negara-negara yang melanggar norma-norma internasional (Xuetong, 2019).

Dalam melihat perang yang berlangsung antara Rusia dan Ukraina, Posisi Tiongkok sebagai negara *wang* yang mengutamakan nilai-nilai moralitas dan norma internasional dalam hal ini tercerminkan dari pernyataan Wang Wenbin, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Dalam konferensi pers yang berlangsung pada 28 Februari 2022, Wenbin dalam hal ini menyebutkan:

Kedaulatan dan integritas teritorial semua negara harus dihormati dan ditegakkan dan tujuan serta prinsip Piagam PBB harus dijaga bersama. Ini adalah prinsip yang dipegang secara konsisten oleh Tiongkok dan norma dasar yang mengatur hubungan internasional yang harus dipatuhi oleh semua negara. Pada saat yang sama kami menyadari kompleksitas sejarah khusus tentang masalah Ukraina dan memahami masalah keamanan Rusia. Tiongkok menyerukan upaya untuk sepenuhnya membuang mentalitas Perang Dingin dan membentuk mekanisme keamanan Eropa yang seimbang, efektif, dan berkelanjutan melalui dialog dan negosiasi (Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, 2022).

Pernyataan otoritas Tiongkok tersebut dalam hal ini menegaskan bahwa Tiongkok secara penuh memahami dan menghargai posisi dari Rusia maupun Ukraina. Dalam pernyataan tersebut tampak bahwa Tiongkok berupaya memposisikan tindakannya sesuai dengan prinsip moral dan norma internasional yang berlaku dengan menghargai dan menghormati kedaulatan serta integritas teritorial yang dimiliki oleh semua negara. Tindakan penghormatan dan penghargaan terhadap kedaulatan tersebut dalam hal ini berbentuk tindakan untuk tidak ikut campur tangan, dengan kata lain Tiongkok dalam hal ini menunjukkan upaya pelestarian dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip yang terkandung di dalam norma non-intervensi sebagai salah satu norma internasional.

Adanya pernyataan tersebut yang berkaitan dengan upaya non-intervensi serta saran bagi setiap pihak untuk melakukan negosiasi dan dialog bersama dalam hal ini merupakan upaya bagi Tiongkok untuk mempertahankan kredibilitas strategisnya sebagai negara *wang*. Yan Xuotong (2019) menyebutkan bahwa untuk mempertahankan kredibilitas dari sebuah negara *wang* salah satu cara yang digunakan adalah dengan memberikan contoh yang baik bagi negara lain melalui tindakan yang sejalan dengan moral dan norma internasional. Dalam hal ini tindakan memberi contoh yang baik telah disampaikan oleh otoritas pemerintahan Tiongkok melalui pernyataan yang dimana menekankan kepada upaya menghormati norma non-intervensi serta adanya masukan atau saran dari pemerintah Tiongkok untuk menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung tersebut dengan mengutamakan jalan negosiasi dan dialog bersama.

Hadirnya berbagai sanksi yang diberikan oleh negara Barat kepada Rusia dalam hal ini juga mendapat perhatian oleh otoritas pemerintah Tiongkok. Dalam konferensi pers yang sama, Wang Wenbin selaku Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, menyebutkan:

“...Tiongkok tidak setuju untuk menyelesaikan masalah dengan sanksi, apalagi sanksi sepihak yang tidak memiliki dasar hukum internasional. Realitas telah lama membuktikan bahwa sanksi tidak hanya gagal menyelesaikan masalah, namun menciptakan masalah baru. Ini akan menghasilkan situasi dimana akan mengganggu proses penyelesaian politik...” (Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, 2022).

Pernyataan tersebut secara tegas menunjukkan ketidaksepakatan Tiongkok kepada negara-negara Barat dalam menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia. Sebagai sebuah negara *wang*, Tiongkok dalam hal ini sadar bahwa pemberian sanksi yang diberikan oleh Barat akan dapat menyebabkan semakin rumitnya konflik yang berlangsung antara Rusia dan Ukraina serta dikhawatirkan dapat memunculkan berbagai masalah baru yang nantinya dapat mengganggu stabilitas dari tatanan internasional. Namun Tiongkok dalam hal ini juga tidak dapat membenarkan tindakan penyerangan yang telah dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Hal ini disampaikan secara tersirat oleh Wang Wenbin pada konferensi

pers yang sama, dimana Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, menyebutkan:

Tiongkok percaya bahwa keamanan satu negara tidak dapat mengorbankan keamanan negara lain, apalagi jika satu negara secara terang-terangan merusak kedaulatan dan keamanan negara lain demi keunggulan militer dan keamanan absolutnya sendiri. Masalah keamanan yang sah dari semua negara harus dihormati. (Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, 2022).

Tiongkok dalam hal ini sadar bahwa tindakan yang telah dipilih oleh Rusia telah mengganggu stabilitas keamanan internasional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan internasional. Yan Xuotong (2019) menjelaskan bahwa dalam memperkuat, mempertahankan dan menunjukkan kredibilitasnya di ranah internasional, negara *wang* dapat memberikan hukuman kepada negara-negara yang melanggar norma-norma internasional. Sebagai negara *wang*, Tiongkok dalam hal ini sadar akan adanya pemberian hukuman kepada Rusia. Namun tidak seperti Barat yang memberikan hukuman dengan menjatuhkan berbagai sanksi yang sangat memberatkan serta menyudutkan posisi Rusia di ranah internasional. Dalam hal ini bentuk hukuman yang diberikan oleh Tiongkok adalah dengan menolak memberikan bantuan pasokan suku cadang pesawat kepada Rusia. Adanya keengganan Tiongkok untuk memenuhi pasokan suku cadang pesawat bagi Rusia dalam hal ini bukan hanya sebagai bentuk hukuman bagi negara tersebut. Pemberian hukuman yang setimpal dan tidak menjatuhkan suatu pihak dalam hal ini merupakan contoh baik yang dimiliki oleh negara *wang*, dimana hal tersebut disebabkan karena adanya upaya membangun tindakan yang bersandar pada prinsip-prinsip moral dan norma internasional (Xuotong, 2011). Dengan kata lain adanya penolakan yang dilakukan oleh Tiongkok tidaklah membahayakan maupun menyudutkan posisi Rusia pada ranah internasional. Penolakan yang dipilih oleh Tiongkok dalam hal ini dapat menjadi contoh baik dari alternatif kebijakan yang dapat diadopsi oleh negara lain.

Paska serangan yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina muncul berbagai kecaman dan respon dari berbagai negara di dunia yang

cenderung menyudutkan posisi Rusia dalam pergaulan global. Namun hal tersebut tidak serta merta membuat Tiongkok mengikuti dan mengambil langkah yang sama untuk langsung menyalahkan tindakan serta posisi Rusia. Tiongkok dalam hal ini sadar betul akan ikatan hubungan yang telah lama terjalin dengan Rusia. Hal tersebut tertuang jelas dalam pernyataan yang disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, yaitu:

“...Tiongkok dan Rusia adalah mitra koordinasi strategis yang komprehensif. Hubungan kami menampilkan non-aliansi, non-konfrontasi, dan non-penargetan pihak ketiga mana pun. Posisi Tiongkok dalam masalah Ukraina konsisten. Kami selalu memutuskan posisi dan kebijakan kami berdasarkan manfaat dari masalah itu sendiri...” (Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, 2022).

Berdasarkan pernyataan tersebut Tiongkok dalam hal ini tentu berupaya menyeimbangkan posisinya sebagai negara *wang* serta hubungannya bersama Rusia sebagai mitra strategis. Oleh karena itu, dengan posisinya sebagai negara *wang*, keengganan Tiongkok untuk memberikan bantuan pasokan suku cadang pesawat kepada Rusia dalam hal ini tidaklah seperti sanksi ekonomi dari Barat yang dapat memberatkan dan mengancam eksistensi Rusia dalam percaturan global. Sehingga adanya penolakan yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap Rusia dalam hal ini tidak serta merta mengganggu hubungan mitra strategis yang telah lama terjalin di antara kedua pihak.

Selain itu kalimat terakhir dari pernyataan yang disampaikan oleh Wang Wenbin selaku otoritas pemerintahan Tiongkok dalam hal ini menunjukkan secara kuat bahwa dalam perang yang berlangsung antara Rusia dan Ukraina, Tiongkok membangun berbagai tindakannya berdasarkan kepada langkah baik untuk masalah itu sendiri. Sebagai negara *wang* yang mengutamakan prinsip moral dalam setiap tindakannya, Tiongkok dalam hal ini melihat bahwa perang yang berlangsung antara Rusia dan Ukraina tidak memberikan dampak baik bagi setiap pihak yang terlibat dan cenderung dapat mengganggu stabilitas dari tatanan internasional. Untuk membentuk tatanan internasional yang bersifat stabil, sebuah

negara *wang* akan berupaya mematuhi dan melestarikan norma-norma internasional yang berlaku (Xuetong, 2011). Sebagai negara *wang*, keinginan dan upaya Tiongkok untuk menjaga stabilitas internasional dengan mematuhi dan melestarikan norma internasional, dalam hal ini tercerminkan secara jelas dari pernyataan Wang Wenbin, yaitu:

“...Kedaulatan dan integritas teritorial semua negara harus dihormati serta ditegakkan dan tujuan serta prinsip Piagam PBB harus dijaga bersama. Ini adalah prinsip yang dipegang secara konsisten oleh Tiongkok dan norma dasar yang mengatur hubungan internasional yang harus dipatuhi oleh semua negara...” (Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, 2022).

Berdasarkan pernyataan yang dilontarkan oleh otoritas Tiongkok tersebut dapat dipahami bahwa Tiongkok dengan kepemimpinannya sebagai negara *wang* berupaya menunjukkan ketaatan serta pelestarian akan norma non-intervensi yang menekan Tiongkok untuk tidak mengganggu serta tidak ikut campur tangan ke dalam urusan kedaulatan negara lain dalam rangka menjaga stabilitas internasional. Sebagai sebuah negara *wang*, tindakan Tiongkok tersebut dapat menjadi contoh yang baik bagi negara lain dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan internasional serta membangun persepsi positif bagi Tiongkok. Pembangunan persepsi serta contoh baik dalam hal ini juga dapat melalui pemberian hukuman bagi negara yang menyimpang atau melanggar dari norma-norma internasional (Xuetong, 2019). Dalam hal ini adanya keengganan Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan pasokan suku cadang pesawat Rusia bukan hanya dapat dimaknai sebagai hukuman ringan yang dijatuhkan oleh Tiongkok, namun juga merupakan upaya Tiongkok untuk tidak ikut campur tangan demi melestarikan norma non-intervensi sebagai norma internasional serta menghindari adanya pandangan dan kecurigaan internasional terkait dengan pembentukan blok maupun sekutu dalam konflik yang berlangsung. Dengan kata lain pemberian hukuman ringan dalam bentuk penolakan Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan akan suku cadang pesawat bagi Rusia dalam hal ini merupakan bentuk dari upaya Tiongkok dalam menciptakan kembali stabilitas serta harmoni di

dalam tatanan internasional berdasarkan prinsip-prinsip moral.

### KESIMPULAN

Sebagai salah satu negara yang diperhitungkan menjadi “*new global power*”, Tiongkok dalam hal ini berupaya menjamin kepemimpinan internasionalnya dengan memosisikan diri sebagai negara *wang* atau otoritas manusiawi yang dimana menekan tindakan berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas serta kepatuhan terhadap norma internasional dalam membangun struktur tatanan dan stabilitas internasional. Kepemimpinan Tiongkok sebagai sebuah negara *wang* dalam hal ini dapat diamati berdasarkan tindakan yang diambil oleh Tiongkok dalam menolak membantu pemenuhan pasokan suku cadang pesawat bagi Rusia.

Adanya kepatuhan terhadap prinsip moral dan ketaatan penuh terhadap norma internasional khususnya norma non-intervensi dalam hal ini telah mendorong Tiongkok memilih untuk menolak membantu Rusia dalam memenuhi kebutuhan pasokan suku cadang pesawat. Tiongkok dalam hal ini sadar akan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah yang dimiliki oleh negara lain. Konflik Rusia dan Ukraina mungkin akan terus mengalami eskalasi serta berpeluang untuk masuknya intervensi dari pihak luar yang mungkin dapat memperburuk situasi. Hadirnya penolakan Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan pasokan suku cadang pesawat bagi Rusia dalam hal ini merupakan bentuk dari ketegasan Tiongkok untuk tidak ikut campur tangan ke dalam konflik yang berlangsung, dengan kata lain tindakan tersebut merupakan bentuk dari kepatuhan Tiongkok terhadap norma non-intervensi sebagai norma internasional serta merupakan upaya untuk menghindari adanya pandangan dan kecurigaan dunia internasional terkait dengan upaya pembentukan blok maupun sekutu dalam konflik yang berlangsung.

Selain itu penolakan yang dilakukan oleh Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan pasokan suku cadang pesawat bagi Rusia merupakan bentuk hukuman yang diberikan oleh negara tersebut. Namun tidak seperti negara-negara Barat yang memberikan hukuman dalam

bentuk sanksi-sanksi berat yang dapat menjatuhkan serta menyudutkan posisi Rusia di dunia internasional. Pemberian hukuman yang dilakukan oleh Tiongkok sebagai negara *wang* dalam hal ini tidak bersifat memberatkan maupun menjatuhkan posisi Rusia dalam percaturan internasional, sehingga ikatan mitra strategis yang telah dibangun oleh Tiongkok dan Rusia tetap terus terjaga. Dalam hal ini adanya penolakan Tiongkok dalam memenuhi pasokan suku cadang pesawat Rusia merupakan bentuk tindakan Tiongkok sebagai negara *wang*. yang dimana berupaya merangkul dan merendahkan konflik yang berlangsung serta menciptakan kembali stabilitas dan harmoni pada tatanan internasional.

### REFERENSI

- Acharya, A. (2019). From heaven to earth: ‘Cultural idealism’ and ‘moral realism’ as Chinese contributions to global international relations. *The Chinese Journal of International Politics*, 12(4): 467-494. (doi: 10.1093/cjip/poz014), [Online]
- Ansori, F. (2018). Pusat Bahasa Mandarin Universitas Al Azhar Indonesia: Refleksi dan Proyeksi Hubungan Sosial Budaya China-Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4(1), 11-16. (<http://dx.doi.org/10.36722/sh.v4i1.246>). [Online]
- Bakry, U. S. (2016). *Metode penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakry, U. S. (2016). *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bakry, U. S. (2017). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Jakarta: Kencana.
- Bellacqua, J. (2007). *China-Russia. Relations in the Early 21st Century*. Virginia: Center For Naval Analysis.
- Benfield, J. A., & Szlemko, W. J. (2006). Internet-based data collection: Promises and realities. *Journal of Research Practice*, 2(2), hal. 1-15.
- Bin, Y. (2011). China-Russia relations: Between geo-economics and geo-politics. *Comparative Connections*, 13(3): hal. 129.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative research journal*, 9(2), 27-40. (doi 10.3316/QRJ0902027), [Online]

- Dobrynskaya, V., & Turkisch, E. (2010). Economic diversification and Dutch disease in Russia. *Post-Communist Economies*, 22(3), 283-302. (<http://doi.org/10.1080/14631377.2010.498680>). [Online]
- Ferdinand, P. (2011). Sino-Russian relations: an analytical overview. Dalam Moshes, A., & Nojonen, M. (Ed.), *Russia-China Relations: current state, alternative futures, and implications for the West*. Helsinki: Ulkopoliittinen Inst: hal.22-37.
- Gerson, M. (2010). *The Sino-Soviet Border Conflict-Deterrence, Escalation, and the Threat of Nuclear War in 1969*. Virginia: Center For Naval Analysis.
- Gusarova, S. (2019). Role of China in the development of trade and FDI cooperation with BRICS countries. *China Economic Review*, 57, 101271. (<https://doi.org/10.1016/j.chieco.2019.01.010>). [Online]
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21-46. (doi: 10.21580/at.v8i1.1163) , [Online]
- Hutabarat, G. F. I. (2022). Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Perang Rusia-Ukraina Berdasarkan Perspektif National Interest. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 3(3), 154-163. (<http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v3i3.132>). [Online]
- Iliev, A., Ivanova, E., & Petreski, D. (2015). USSR-China relations in the Cold and post Cold war era. *Wulfenia Journal*, 22(3):, hal. 313-326.
- Izzalqurny, T. R., & Nabila, F. (2021). Apakah Paradigma Nonpositivism (Interpretif, Kritis dan Posmodernis) dalam Akuntansi? Ilmiah??. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 11(1), 13-26. (<https://doi.org/10.26714/>), [Online]
- Kaczmarek, M. (2017). Non-western visions of regionalism: China's New Silk Road and Russia's Eurasian economic Union. *International Affairs*, 93(6), 1357-1376. (doi: 10.1093/ia/iix182). [Online]
- Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (2022, Februari, 28). Foreign Ministry Spokesperson Wang Wenbin's Regular Press Conference on February 28, 2022. [https://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/xwfw\\_665399/s2510\\_665401/202202/t20220228\\_10646378.html](https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/202202/t20220228_10646378.html)
- Krivokhizh, S., & Soboleva, E. (2017). The Past Serving the Present: Yan Xuetong's Theory of Moral Realism and the Future of the Global Order. *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya*, 61(11), 76-84. (<https://doi.org/10.20542/0131-2227-2017-61-11-76-84>). [Online]
- Lai, H. H. (2005). Contrasts in China and Soviet reform: Sub-national and national causes. *Asian Journal of Political Science*, 13(1), 1-21. (<https://doi.org/10.1080/028>), [Online]
- Laumulin, M. (2006). The Shanghai Cooperation Organization as 'geopolitical Bluff'? A View from Astana. *Russie. Nei. Visions*, 12(1): hal. 1-20.
- Nasution, E. D., & Raudia, Z. (2022, December). Analysis of Russian War Violations in the 2022 Ukrainian Conflict Based on the Perspective of International Humanitarian Law. In *International Conference on Sustainable Innovation on Humanities, Education, and Social Sciences* (pp. 361-374). Atlantis Press
- Nemeth, M. (2021). The Sino-Soviet Border Conflict of 1969. *Open Journal of Political Science*, 11(2), 242-250. (doi: 10.4236/ojps.2021.112016) [Online]
- Pamungkas, A. C., Alunaza, H., Shafitri, D. N., & Putri, A. (2022). Implikasi Sanksi Ekonomi Bagi Rusia Terhadap Potensi Eskalasi Harga Minyak Dan Gas Alam Pada Distribusi Pasar Dunia. *Journal of International Relations (JoS)*, 1(2): hal. 50-66.
- Pamungkas, H. Y. (2011). "Kehadiran Armada Militer Amerika Serikat Pada Sengketa Kepulauan Spratly". Skripsi. Universitas Negeri Jember.
- Pandey, D. K., & Kumar, R. (2022). Russia-Ukraine War and the global tourism sector: A 13-day tale. *Current Issues in Tourism*, 19. (<https://doi.org/10.1080/13683500.2022.2081789>). [Online]
- Perry, E. J. (2019). Making communism work: sinicizing a soviet governance practice. *Comparative Studies in Society and History*, 61(3), 1-28. (doi:10.1017/S001), [Online]
- Priangani, A. (2015). Perkembangan Brics (Brazil, Russia, India, China and South Africa) Dalam Kancah Ekonomi Politik Global. *Jurnal Kebangsaan*, 4(7): hal.35-39.

- Rahardjo, M. (2018). *Paradigma interpretif*. Malang: UIN Malang
- Reuters. (2022, Maret, 10) . Russia Says China Refuses Supply Aircraft Parts After Sanctions. <https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/russia-says-china-refuses-supply-aircraft-parts-after-sanctions-2022-03-10/>
- Rosyidin, M. (2020). *Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Shevtsova, M. (2022). Looking for Stepan Bandera: The Myth of Ukrainian Nationalism and the Russian ‘Special Operation’. *Central European Journal of International and Security Studies*, 16(3), 132150. (<https://doi.org/10.51870/GWWS9820>).[Online]
- Sugiyono, P. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Syabbuddin, S., & Haryati, T. (2022). Kompleksitas Konflik Ukraina-Rusia. *Jurnal Pendidikan IPS*, 12(1), 39-48. (<https://doi.org/10.37630/jpi.v12i1.617>).[Online]
- Tsygankov, A. P. (2013). The Russia-NATO mistrust: Ethnophobia and the double expansion to contain “the Russian Bear”. *Communist and Post-Communist Studies*, 46(1),179-188. (<https://doi.org/10.1016/>). [Online]
- Ugoala, B. (2022). Power in words: An Analysis of the Flaming Devices in President Vladimir Putin’s Speech Before the February, 2022 Attack on Ukraine. *KIU Journal of Humanities*, 7(2): hal.171-179.
- Xuetong, Y. (2011). Ancient Chinese thought, modern Chinese power. In *Ancient Chinese Thought, Modern Chinese Power*. New Jersey: Princeton University Press.
- Xuetong, Y. (2019). *Leadership and the rise of great powers*. New Jersey: Princeton University Press.
- Yaqing, Q. (2010). International society as a process: Institutions, identities, and China’s peaceful rise. *The Chinese Journal of International Politics*, 3(2), 129-153. (doi:10.1093/cjip/poq007). [Online]
- Zhang, F. (2012). The Tsinghua approach and the inception of Chinese theories of international relations. *Chinese Journal of International Politics*, 5(1), 73-102.( doi:10.1093/cjip/por015), [Online]
- Zhuangzhi, S. (2007). *The Relationship between China and Central Asia. Eager eyes fixed on Eurasia*, Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University.